

ABSTRAK

Reynaldo: Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Nelayan di Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. Skripsi: Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2022.

Tujuan penelitian adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan dalam pemberdayaan nelayan di Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang sudah terlaksanakan namun belum maksimal, dimana dalam peran sebagai regulator, karena Pemerintah Kabupaten Ketapang sendiri belum membuat regulasi dibidang perikanan. Pemerintah Kabupaten Ketapang hanya menjalankan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Sebagai dinamisator sudah terlaksanakan namun belum maksimal, karena dinas belum memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan mampu dalam mengajak masyarakat nelayan agar terciptanya kepedulian masyarakat atau partisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Sebagai fasilitator sudah berjalan tetapi belum optimal, dikarenakan kurangnya berbagai bantuan serta tidak meratanya pembagian fasilitas yang diberikan kepada nelayan berupa sarana dan prasarana alat penangkapan. Pemerintah Kabupaten Ketapang disarankan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masyarakat nelayan agar pembinaan yang diberikan kepada mereka mampu meningkatkan kualitas nelayan, kemudian mampu menggerakkan setiap program yang di berikan oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan.

ABSTRACT

Reynaldo: *The Role of the Food Security and Fisheries Service in Empowering Fishermen in Sungai Bakau Village, Matan Hilir Selatan District, Ketapang Regency.* Thesis: Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak 2022.

The purpose of this research is to describe and analyze the role of the Department of Food Security and Fisheries as a regulator, dynamist and facilitator in empowering fishing communities in Sungai Bakau Village, Matan Hilir Selatan District, Ketapang Regency. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. The results showed that the role of the Department of Food Security and Fisheries in empowering fishermen in Sungai Bakau Village, Matan Hilir Selatan District, Ketapang Regency has been implemented but has not been maximized, where in its role as a regulator, because the Ketapang Regency Government itself has not made regulations in the field of fisheries. The Ketapang Regency Government only implements the existing rules in Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen. As a dynamist, it has been implemented but has not been maximized, because the service does not yet have the ability to provide guidance, direction, and is able to invite fishing communities to create community awareness or active participation in any development. As a facilitator, it has been running but is not optimal, due to the lack of various assistance and the unequal distribution of facilities provided to fishermen in the form of fishing equipment and infrastructure. It is suggested that the Ketapang Regency Government through the Food and Fisheries Security Service needs to give more serious attention to the fishing community so that the guidance given to them is able to improve the quality of fishermen, then be able to move every program provided by the government to improve the economy of the fishing community.

Keywords: Role, Empowerment, Fishing Community.



RINGKASAN

Penelitian ini berjudul: Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Nelayan di Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. Permasalahan yang diangkat bersumber dari belum maksimalnya pelaksanaan program pemerintah mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan seperti ketersediaan modal, sarana dan prasarana pendukung, yang menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha masyarakat nelayan. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dalam pemberdayaan masyarakat nelayan guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha perikanan di Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang.

Tujuan yang hendak dicapai adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sebelumnya sudah ada informasi mengenai gejala berupa kata-kata dimana semua data yang dikumpulkan di lapangan. Lokasi penelitian di Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang. Data penelitian diperoleh dengan wawancara mendalam Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Desa dan Masyarakat Nelayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sungai Bakau Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, belum dilakukan secara maksimal antara lain: 1) Sebagai

regulator sudah terlaksana tetapi belum maksimal. Salah satunya adalah di bidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi secara keseluruhan, karena Pemerintah Kabupaten Ketapang sendiri belum membuat regulasi dibidang perikanan. Pemerintah Kabupaten Ketapang hanya menjalankan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. 2) Sebagai dinamisator sudah terlaksana namun belum maksimal, karena dinas belum memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan mampu dalam mengajak masyarakat nelayan agar terciptanya kepedulian masyarakat atau partisipasi aktif dalam setiap pembangunan. 3) Sebagai fasilitator sudah berjalan tetapi belum optimal, dikarenakan kurangnya berbagai bantuan serta tidak meratanya pembagian fasilitas yang diberikan kepada nelayan berupa sarana dan prasarana alat penangkapan dan kurangnya perhatian dari pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan baik dari penyediaan fasilitas penyuluhan ataupun pelatihan kepada kelompok nelayan di Desa Sungai Bakau.

Saran atau rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu Pemerintah Kabupaten Ketapang disarankan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masyarakat nelayan agar pembinaan yang diberikan kepada mereka mampu meningkatkan kualitas nelayan, kemudian mampu menggerakkan setiap program yang di berikan oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Untuk pemberian fasilitas kepada nelayan harus lebih menyeluruh, pemerintah disarankan untuk menindak lanjuti setiap bentuk pemberdayaan yang telah diprogramkan khususnya dalam pemberian alat tangkap, pelatihan dan premi asuransi nelayan yang tidak hanya sampai proses pemberian tetapi sampai pada proses evaluasi sehingga program yang dijalankan tepat sasaran dan tepat guna.